

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



INATIN Acuan Harga Timah Dunia

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan
Kemakmuran
Rakyat

remarkable
Indonesia

Pemerintah Dorong
Bursa Berkelas
Internasional
....6

Bulog Masuk
Bisnis SRG
...8

Sulut Tunjuk Swasta
Kelola PLKA
...10



Foto : Buletin Kontrak Berjangka tersedia di Lt. 3 Gedung Bappebti.

Berangsur-angsur pasar komoditi terorganisir terbentuk di dalam negeri. Hal itu menandakan Indonesia sebagai salah satu negara produsen komoditi terbesar di dunia.

Pasar terorganisir komoditi itu sangat penting keberadaannya di Indonesia. Agar pemerintah dapat mengontrol dan memberi dukungan kebijakan perdagangan komoditi dari sejumlah komoditi unggulan tersebut. Selain itu, pasar terorganisir menjadi sumber informasi harga yang dapat dijadikan acuan para pelaku komoditi.

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) pada 1 Februari 2012, lalu, telah meresmikan perdagangan perdana pasar fisik komoditi timah. Pasar fisik komoditi timah tersebut diperkenalkan dengan nama INATIN.

Pemerintah menyambut baik diselenggarakannya pasar fisik timah di dalam negeri. Seperti diutarakan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, pasar fisik timah INATIN akan mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas produksi industri hilir timah di dalam negeri. Karena, arah kebijakan pemerintah ke masa depan yakni meningkatkan industri hilir di dalam negeri.

Lebih jauh ditegaskan Bayu Krisnamurthi, dengan adanya pasar timah di dalam negeri, investor asing pun akan masuk membangun industri hilir di Indonesia. Sehingga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Di sisi lain, industri hilir tersebut meningkatkan

nilai tambah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jauh sebelumnya, ekspor timah Indonesia berkisar 90.000 ton pertahun diperdagangkan dengan mengacu pada harga timah yang terjadi di London Metal Exchange (LME) dan Kuala Lumpur Tin Market (KLTM). Pada hal kedua negara itu tidak menghasilkan komoditi timah.

Informasi lain yang mengembirakan dari laporan edisi kali ini adalah, Bulog akan masuk sebagai salah satu pelaku sistem resi gudang (SRG). Hal itu diungkapkan Meneg BUMN, Dahlan Iskan.

Dikatakan, Dahlan Iskan, Bulog harus cepat-cepat masuk bisnis SRG untuk membantu pemerintah dalam mengatasi para tengkulak. Dan, jaringan Bulog yang demikian luas dengan jumlah gudang yang banyak berkapasitas besar, akan meningkatkan ketahanan pangan di dalam negeri.

Juga ditegaskan Dahlan Iskan, dalam pengadaan beras Bulog tidak boleh lagi lewat pedagang tetapi langsung kepada petani. Dengan begitu, Bulog tidak lagi dianggap sebagai perusahaan yang hanya menjadi tukang tadah beras, namun sudah harus 'jemput bola' ke petani atau bahkan bisa ikut menanam padi.

Selain dua laporan yang mengembirakan tadi, tentunya Redaksi menyajikan laporan lain yang bermanfaat bagi pembaca. Karenanya, silahkan dibaca dan semoga bermanfaat demi kemajuan bangsa.

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggu- Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus Muharni S., Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Erni Artati, Sri Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke

E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....4-5

- INATIN Acuan Harga Timah
- Mengikis Spekulasi Timah

Berjangka6-7

- Pemerintah Dorong Bursa Berkelas Internasional
- Perizinan On Line Pacu Kinerja Industri

Resi Gudang8-9

- Bulog Harus Masuk Bisnis SRG
- Sinergi Ketahanan Pangan

Pasar Lelang.....10-11

- Sulut Tunjuk Swasta Kelola PLKA

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Institusi Pencegah Korupsi & *Money Laundry*
- Bappebti Batalkan Izin PT. Vickniks International
- Ajang Edukasi Masyarakat
- Kontrak SPA Harus Miliki Izin

Analisa.....18

Info Harga.....19

Wawasan.....22-23

- Peluang & Tantangan SRG

Kolom.....24-25

- Ciptakan Pedagang Perseorangan

Breaknews.....26

Interview...12-13

Pembiayaan SRG
Seharusnya 85 %



Komoditi...20-21

Biji Bunga Matahari
Minyak Nabati
Dari Masa ke Masa



Kiprah...27

Targetkan No 1
di Indonesia Timur





INATIN Acuan Harga Timah Dunia

Wamendag, Bayu Krisnamurthi

INATIN bersaing dengan LME dan KLTM menjadi acuan harga timah dunia. Terbentuknya pasar fisik timah di dalam negeri mendorong berkembangnya industri hilir timah. Sehingga ekspor timah batangan bisa diredam.

Komoditi timah merupakan salah satu komoditi andalan yang memiliki peran penting pada perekonomian Indonesia dalam mendatangkan devisa negara. Di samping itu, industri timah di wilayah Bangka Belitung (Babel) sebagai salah satu sektor penyerap lapangan kerja terbesar. Indonesia saat ini sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Dan, ekspor timah Indonesia sekitar 90 persen dari total produksi nasional. Tiga tahun terakhir, ekspor timah Indonesia lebih dari 90 ribu ton. Tahun 2011 ekspor timah mencapai 96.023 ton, tahun 2010 sebesar 92.486 ton dan tahun 2009 sebesar 99.287 ton.

"Volume ekspor timah Indonesia yang senantiasa tinggi dibandingkan Cina sebagai produsen utama dunia, harus disikapi serius. Jangka panjang deposit timah di Indonesia bisa habis dan malah jadi net impor. Dibandingkan dengan negara Cina, hampir seluruh produksi timah diserap industrinya," demikian antara lain diutarakan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, saat peluncuran perdagangan perdana pasar fisik timah yang diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), 1 Februari 2012, di gedung BKDI, Jakarta.

Perdagangan perdana pasar fisik timah BKDI yang dikenal dengan INATIN, juga dihadiri Kepala Badan Penga-

was Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, Dirut PT Timah Tbk., Wachid Usman, Komisaris dan Direksi BKDI, Komisaris dan Direksi PT Identrust Security International, pelaku pasar timah dari dalam negeri dan para perwakilan pembeli timah dari luar negeri.

Industri Hilir

Wamendag Bayu Krisnamurthi lebih jauh dikatakan, harga timah yang terjadi di pasar INATIN bisa digunakan sebagai harga acuan perdagangan timah. "Kalau selama ini pelaku pasar timah di dalam negeri mengacu pada harga timah yang terjadi di London Metal Exchange (LME) dan Kuala Lumpur Tin Market (KLTM), maka sekarang Indonesia sudah memiliki harga acuan timah dari INATIN."

"Harga timah dari pasar fisik timah INATIN lebih signifikan dibandingkan dengan LME dan KLTM. Karena, timah yang diperdagangkan di dunia itu asalnya dari Indonesia. Tetapi selama ini yang mengontrol harga timah adalah pelaku asing melalui LME dan KLTM. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi, makanya seluruh stakeholders harus memberi dukungan," harapan Bayu Krisnamurthi.

Menurut Wamendag, tujuan lain dibentuknya pasar fisik timah INATIN di dalam negeri yakni untuk meminimalisir capital out flow.

"Pasar fisik timah ini pun akan mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi industri hilir timah di dalam negeri. Arah kebijakan pemerintah ke masa depan sangat jelas, yakni meningkatkan industri hilir di dalam negeri. Dengan demikian akan masuk investasi asing membangun industri hilir di Indonesia, sehingga membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Di sisi lain, industri hilir tersebut meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," tandas Bayu Krisnamurthi.

Sementara itu, Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, kelak INATIN akan dijadikan model percontohan bagi sistem perdagangan komoditi unggulan Indonesia lainnya.

"Indonesia merupakan produsen sejumlah komoditi yang dibutuhkan dunia, tetapi Indonesia belum memiliki pasar yang terorganisir. Sehingga kita selalu mengacu harga yang terjadi di pasar internasional. Itu tidak benar," jelas Syahrul.

"Di era perdagangan modern seperti sekarang ini, harga suatu komoditi ditentukan berdasarkan produsen. Kalau harga komoditi terjadi di negara yang bukan produsen, maka hampir bisa dipastikan harga itu dipengaruhi tindakan para spekulator," kata Syahrul R. Sempurnajaya. ▲



Wamendag berjabat tangan dengan peserta INATIN

Mengikis Spekulan Timah

Pedagangan perdana pasar fisik timah yang diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dengan kode perdagangan INATIN, pada 1 Februari 2012, berhasil melampaui harga timah yang terjadi di London Metal Exchange (LME). Perdagangan yang hanya berlangsung selama 15 menit dan dimulai pukul 14.30 WIB, memperdagangkan sebanyak 2 lot kontrak timah dengan harga di level US\$ 24.500 per ton. Sementara itu, harga spot timah di LME berada pada level US\$ 24.290 per ton.

Menurut Peter Kettle, Manajer Penelitian International Tin Research Institute (ITRI) yang berbasis di St. Albans, Inggris, INATIN berpotensi menjadi harga acuan timah dunia selama pembeli dan penjual ramai memasuki pasar BKDI.

"LME selama ini menjadi patokan utama harga timah dunia karena sudah cukup lama menjadi acuan harga. Selain itu, perdagangan di LME relatif lebih besar dari segi volume transaksi," kata Peter Kettle.

Peluncuran perdana INATIN ditandai dengan masuknya sembilan produsen sebagai anggota BKDI. Masing-masing PT Timah Tbk (TINS), 3H CO Ltd,

Gold Matrix Resources Pte Ltd., Purple Products Pvt Ltd, PT Tambang Timah, PT Mitra Stania Prima, PT Comexindo International, PT Timah Industri dan PT Refined Banka Tin.

Dari sembilan perusahaan peserta INATIN tersebut, satu-satunya peserta perusahaan lokal adalah PT Comexindo International. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan timah yang dimiliki Hashim Djojohadikusumo.

Terjamin

Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, target transaksi INATIN untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar 10.000 ton. Dan, komoditi timah yang diperdagangkan itu berasal dari PT Timah Tbk. Sehingga kualitasnya relatif terjamin.

"PT Timah telah berkomitmen menyediakan timah sebesar 10.000 ton pada tahun ini. Tapi jumlahnya bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar," jelas Megain.

Sebagai eksportir terbesar di dunia, tambah Megain, INATIN dapat menciptakan harga yang wajar dan transparan, serta dapat menjadi acuan harga bagi perdagangan timah dunia.

Lebih jauh dijelaskan Megain, Spesifikasi kontrak INATIN ditentukan lima metrik ton untuk setiap ton dengan

“Perdagangan komoditi timah INATIN harga akan bergerak sesuai dengan keseimbangan permintaan dan pasokan timah di pasaran.”

fluktuasi harga minimum US\$ 5. Kualitas timah yang diperdagangkan memiliki kadar timah minimum 99,90% (Sn 99,90%).

Penyelesaian kontrak diselesaikan dengan penyerahan fisik melalui delivery points di Pangkal Balam dan Mentok yang terletak di lokasi penghasil timah, Pulau Bangka Propinsi Bangka Belitung.

Sementara itu, Ketua Komite Timah, yang juga Dirut PT Timah Tbk., Wachid Usman, mengatakan, keberadaan pasar timah di BKDI akan membawa dampak positif bagi penghasil timah di Indonesia.

"Perdagangan komoditi timah INATIN harga akan bergerak sesuai dengan keseimbangan permintaan dan pasokan timah di pasaran. Jadi pasarnya lebih transparan," terang Wachid.

"Di INATIN, pelaku industri timah di Indonesia akan turut aktif dalam menentukan harga timah, jadi tidak sekedar menunggu harga yang ditetapkan negara lain," ujar Wachid Usman. ▲



Pemerintah Dorong Bursa Berkelas Internasional

Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya, narasumber talk show perdagangan berjangka yang diselenggarakan PT. First State Futures, Surabaya.

Pemerintah berkeinginan kuat untuk menggerakkan dan mengembangkan industri perdagangan berjangka di dalam negeri. Karena manfaatnya banyak, baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun sebagai instrumen mengelola risiko harga.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, saat dialog terbuka yang diselenggarakan PT First State Futures, di sebuah pusat perbelanjaan Surabaya, Jatim, 23 Februari 2012.

Narasumber lain dalam dialog itu diantaranya Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintaryo dan CEO PT First State Futures, Jeffry Suryono. Dialog terbuka tentang perdagangan berjangka komoditi itu merupakan rangkaian kegiatan menyambut dua tahun beroperasinya PT First State Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Lebih jauh diutarakan Syahrul R.

“*bursa berjangka komoditi yang ada di Indonesia harus memiliki karakter tersendiri dan mampu bersaing dengan bursa berjangka asing*”

Sempurnajaya, amandemen Undang-undang No 32/1997 menjadi Undang-undang No 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi, kebijakan pemerintah untuk jangka panjang antara lain menjadikan bursa berjangka Indonesia sebagai bursa berkelas dunia.

“Harapan pemerintah seperti itu, bursa berjangka komoditi yang ada di Indonesia harus memiliki karakter tersendiri dan mampu bersaing dengan bursa berjangka asing,” jelas Syahrul.

Modal bursa berjangka komoditi Indonesia untuk bisa bersaing secara internasional dan berkarakter cukup banyak, tambah Syahrul. Modalnya antara lain, kontrak komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka merupakan komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Dan, komoditi yang dihasilkan itu masing-masing memiliki karakter. Komoditi kopi robusta misalnya, jenis yang sama tetapi cirinya berbeda berdasarkan daerah di mana kopi tersebut ditanam.

“Hingga saat ini belum ada bursa berjangka di dunia yang memperdagangkan kontrak berjangka komoditi kopi berdasarkan daerah produksi. Yang ada hanya berdasarkan jenis jenis kopi robusta atau arabika. Karena itu, kami mengharapkan bursa bisa menciptakan kontrak berjangka komoditi kopi berdasarkan daerah,” tegas Syahrul.

“Selain itu, jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih dari 240 juta jiwa merupakan pasar potensial dari industri ini,” papar Syahrul.

“Pihak asing saja sudah menganggap Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar dunia untuk berbagai produk

dan jasa. Jadi, kita tidak boleh lengah agar pihak asing tidak membanjiri Indonesia dengan berbagai produk dan jasanya. Maka dari itu, seluruh stakeholder industri perdagangan berjangka Indonesia harus bahu-membahu membangun industri ini,” papar Syahrul.

Terkait dengan itu, menurut Syahrul R. Sempurnajaya, seluruh lapisan masyarakat perlu diedukasi dan disosialisasikan manfaat dan pentingnya instrumen perdagangan berjangka komoditi. “Seperti dikatakan pribahasa, tak kenal maka tak sayang.”

“Tugas utama Bappebti selain melakukan pengawasan dan pembinaan, yakni melakukan edukasi dan sosialisasi. Oleh karena itu kami sangat mendukung kegiatan seperti yang dilakukan PT First State Futures ini,” katanya.

Terlebih lagi, jelas Syahrul, Kota Surabaya merupakan salah satu kota bisnis terbesar di Indonesia. Dan, dari Kota Surabaya cukup banyak komoditi yang diperdagangkan dengan tujuan ekspor.

Senada dengan itu, CEO PT. First State Futures, Jeffry Suryono, mengatakan, pihaknya setiap tahun sudah mengagendakan kegiatan edukasi dan sosialisasi perdagangan berjangka komoditi minimal sebanyak empat kali dalam setahun.

“Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi maka dipastikan masyarakat menjadi lebih smart dan bijak menggunakan dana yang dimiliki untuk berinvestasi,” imbuah Jeffry Suryono. ▲



Perizinan On Line Pacu Kinerja Industri

Sudah tidak jamannya lagi pelayanan publik dipersulit apa lagi memakan waktu yang panjang. Di era informasi dan teknologi seperti saat ini, pelayanan publik seharusnya dapat dilakukan dengan ringkas dan efisien. Bahkan, dalam pelayanan publik dengan teknologi informasi, tidak perlu ada tatap muka berulang kali.

“Jika ada pelayanan publik yang perlu tatap muka berkali-kali tentu saja sudah membuang energi dan waktu, termasuk materi. Dan, tatap muka berkali-kali itu berpotensi terjadinya tindakan manipulasi baik dari pelayan publik maupun masyarakat pemohon izin,” demikian dikatakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R. Sempurnajaya, dihadapan peserta pelatihan sistem perizinan on line bagi pelaku perdagangan berjangka komoditi, pada 17 Februari 2012, di Jakarta. Pelatihan itu diikuti sebanyak 90 peserta dari bursa berjangka, lembaga kliring, perusahaan pialang dan pedagang berjangka, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Pusat Data dan Informasi Perdagangan.

“Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mendukung pelayanan publik yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, Bappebti sebagai salah satu institusi yang melayani kepentingan publik memandang penting pelayanan publik dengan mekanisme on line. Sehingga lebih cepat dan transparan. Maka, dari peserta pelatihan perizinan on line ini, saya harapkan nantinya bisa mengaplikasikan sistem perizinan on line di

perusahaan masing-masing. Sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan mudah,” ujar Syahrul.

Menurut Syahrul R. Sempurnajaya, program reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pendorong bagi Bappebti untuk menciptakan aplikasi sistem perizinan on line. Dengan harapan dapat mempermudah para pelaku pasar dalam mengajukan permohonan perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

“Salah satu penilaian kinerja Bappebti di Kementerian Perdagangan yakni tentang perizinan bagi pelaku usaha. Kalau perizinan ini tidak terlaksana dengan baik, maka kinerja bisa dikatakan buruk. Dan, dampaknya kami selaku pejabat Bappebti akan dinilai gagal,” terang Syahrul.

Kepala Biro Perniagaan, Robert J. Bintaryo, mengatakan, sistem perizinan on line adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang berperan sebagai alat bantu pengelolaan perizinan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang ada di Bappebti. Sistem ini memberikan kemampuan dan kemudahan dalam melakukan kontrol pelaksanaan pelayanan perizinan.

“Bappebti dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menciptakan iklim kemudahan dalam pelayanan, terutama perizinan terhadap pelaku usaha, telah menempuh berbagai kebijakan melalui penerapan pola pelayanan secara on line,” jelas Robert.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari pelayanan secara on line ini, tambah Robert, bagaimana para aparat negara dapat memberikan pelay-

anan kepada pelaku usaha lebih sederhana, efektif dan efisien serta dapat memberikan gambaran dan kejelasan yang pasti bagi pelaku usaha.

“Pengoperasian sistem perizinan secara on line ini, akan berjalan transparan, efisien dan efektif serta dapat dipantau perkembangannya oleh pemohon secara langsung melalui sistem. Jadi kalau ada kekurangan persyaratan yang sudah ditentukan untuk memperoleh izin belum dilengkapi pemohon, maka sistem tersebut akan menampilkan kekurangannya dan meminta pemohon untuk memenuhinya,” kata Robert J. Bintaryo. ▲

Permohonan Perizinan On Line Bappebti

- Izin Usaha Sebagai Pialang Berjangka
- Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
- Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka
- Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
- Persetujuan Bank Penyimpanan Margin, Dana Kompensasi Dan Dana Jaminan
- Persetujuan Sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif
- Persetujuan Sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
- Izin Usaha Bursa Berjangka
- Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka Mekanisme
- Pemberian Persetujuan Pialang Untuk Penyaluran
- Amanat Nasabah Bursa Luar Negeri
- Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan
- Persetujuan Perubahan Alamat Perusahaan
- Persetujuan Perubahan Pengurus/Pemegang Saham
- Persetujuan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka
- Persetujuan Pemberhentian Direktur Kepatuhan
- Persetujuan Perubahan Alamat Kantor Cabang
- Persetujuan Untuk Melakukn Kegiatan atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi



Meneg BUMN, Dahlan Iskan.

Bulog Harus Masuk Bisnis SRG

Bulog tidak sekedar PSO, tetapi juga harus kreatif menjadi korporasi berkembang dan membesar di bidang komoditi pangan.

Perum Bulog sebagai perusahaan pelaksana pelayanan publik (public service obligation/PSO) dan perpanjangan tangan pemerintah dalam distribusi komoditi pangan, harus kreatif mengembangkan usahanya. Salah satu terobosan yang bisa dikembangkan perusahaan plat merah ini adalah memasuki bisnis sistem resi gudang (SRG). Dengan SRG, Bulog bisa menggarap bisnis komoditi pangan dari hulu hingga hilir.

Demikian antara lain diutarakan Menteri BUMN Dahlan Iskan, kepada Wartawan baru-baru ini saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN.

“Bulog sudah harus berubah. Tidak lagi sekedar menjadi perusahaan penerima subsidi untuk PSO, tetapi harus menjadi perusahaan korporasi yang berkembang dan membesar,” jelas Dahlan.

Menurut Dahlan, di samping tetap menjalankan fungsi PSO, Bulog juga harus masuk ke bisnis lain yang non-PSO, sehingga dapat meningkatkan kinerja pe-

rusahaan. “Dengan SRG, pengadaan beras Bulog tidak lagi lewat pedagang tetapi bisa langsung kepada petani.”

“Dengan begitu, Bulog tidak lagi dianggap sebagai perusahaan yang hanya menjadi tukang tadah beras, namun sudah harus ‘jemput bola’ ke petani atau bahkan bisa juga ikut menanam padi,” katanya.

“Dari sisi pendanaan Bulog bisa saja membentuk anak usaha sehingga lebih fleksibel dan bisa bersaing dengan pedagang swasta, karena tidak lagi tergantung pada sumber-sumber pendanaan tertentu,” papar Dahlan.

Lebih jauh diutarakan Dahlan Iskan, Bulog harus berperan aktif menjalankan SRG, agar lebih banyak menyerap beras termasuk komoditi pertanian lainnya dalam jumlah besar.

“Bulog harus cepat-cepat masuk bisnis SRG untuk membantu pemerintah dalam mengatasi para tengkulak. Bulog memiliki jaringan luas dan jumlah gudang dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan untuk mengadopsi bisnis SRG. Karena itu, saya akan terus mendorong Bulog untuk masuk ke dalam bisnis SRG,” katanya.

Peran Pemda

Menteri Pertanian, Suswono, di sisi lain menilai, dalam penerapan SRG diberbagai daerah, pemerintah daerah belum optimal menjalankan program tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peran aktif Pemda agar tujuan untuk menyejahterahkan petani di tanah air bisa terlaksana.

“Pemda harus lebih dinamis menjalankan roda SRG, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah. Salah satunya mengatasi permasalahan rendahnya harga komoditas ketika panen tiba,” jelas Suswono.

“Kelihatannya fungsi resi gudang belum berjalan dengan baik di beberapa tempat di daerah. Karenanya konsep yang bagus ini harusnya bisa dioptimalkan. Saya kira dalam hal ini Pemda harus lebih aktif,” ujar Suswono.

“Saya kira SRG adalah salah satu solusi yang baik buat petani, karena ketika harga jatuh petani dapat menaruh dulu hasil panennya di gudang dan menunda penjualan. Lalu petani memanfaatkan pendanaan untuk melanjutkan kegiatan taninya,” ujar Suswono.

Selain itu, SRG merupakan cara ampuh untuk menghindari terjadinya spekulasi-spekulasi harga disaat panen tiba, tambah Suswono.

Senada dengan itu, Anggota Komisi VI, DPR-RI, Yussyus Kuswandana, mengatakan, sejatinya Pemda merupakan garda terdepan dalam implementasi SRG di daerah. Tanpa dukungan aktif dari Pemda, SRG akan sulit berkembang.

“Pemerintah pusat pada dasarnya hanya memfasilitasi program SRG, seperti memberi pelatihan dan sosialisasi. Tetapi yang mengetahui komoditi pangan itu ada di wilayah mana, dan skema SRG ini bisa dijalankan seharusnya Pemda yang menentukan,” jelas Yussyus.

Oleh karena itu, tambah Yussyus Kuswandana, kami pun sangat mengharapkan legislatif lokal juga harus berperan mendorong Pemda untuk implementasi SRG. ▲

“Bulog harus berperan aktif menjalankan SRG, agar lebih banyak menyerap beras termasuk komoditi pertanian lainnya dalam jumlah besar”

Kab. Muba & PT Pertani **Sinergi Ketahanan Pangan**



Bupati Muba, Pahri Azhari dan Dirut PT. Pertani Dwi Ananto menandatangani MoU di saksikan Kepala BAPPEBTI Syahrul R. Sempurnajaya.

Intensifikasi pembiayaan pasca panen melalui skema sistem resi gudang (SRG) di berbagai daerah terus digalakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku lembaga pembina dan pengawas SRG. Upaya implementasi pembiayaan alternatif itu dilakukan dengan berbagai pendekatan, kerjasama dan sosialisasi kepada dunia usaha, lembaga keuangan serta petani di berbagai daerah.

Tujuan terselenggaranya SRG di berbagai daerah antara lain mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, memberdayakan petani menghasilkan komoditi pangan berdaya saing tinggi sehingga memiliki nilai jual dan pasar yang transparan.

Dalam kaitan itu, PT Pertani (Perse-ro) selaku pengelola gudang yang telah mengantongi izin dari Bappebti, bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) guna mengembangkan instrumen SRG di daerah tersebut. Kerjasama dua pihak ini diwujudkan melalui program yang diberi nama Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, menyaksikan penandatanganan MoU antara Dirut PT Pertani, Dwi Ananto dengan Bupati Kabupaten Muba, Pahri Azhari. Penandatanganan MoU itu dilaksanakan pada 7 Februari 2012 di Surabaya, bersamaan dengan acara rapat kerja PT Pertani. Acara itu juga dihadiri M. Nurgaibita dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indone-

sia (PERPADI).

Syahrul R. Sempurnajaya mengatakan, dilaksanakannya MoU antara PT Pertani dengan Pemda Muba menunjukkan adanya semangat bersama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SRG di Indonesia. Semangat itu tentunya untuk meningkatkan dan memberdayakan petani di berbagai daerah.

“Program SRG ini dapat berperan dan mendukung program pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan peningkatan hasil produksi petani dan terjaminnya harga di tingkat petani, akan mendorong para petani berproduksi. Dengan SRG petani tidak perlu ragu jika harga komoditi anjlok saat masa panen. Karena petani dapat memperoleh pembiayaan sebesar 70 persen dari nilai komoditi yang dijaminkan,” jelas Syahrul.

Dengan memperoleh pembiayaan dari perbankan sebesar 70 persen, tambah Syahrul, petani bisa melanjutkan proses tanam berikutnya.

“Manfaat lain yang diperoleh dengan pembiayaan SRG ini, petani mendapatkan subsidi bunga yang ditanggung pemerintah. Sehingga petani hanya dikenakan bunga bank sebesar 6 persen hingga jatuh tempo resi gudang,” jelas Syahrul R. Sempurnajaya.

Tiga Gudang

Bupati Muba, Pahri Azhari, mengatakan, kerjasama dengan PT Pertani itu diharapkan dapat mendorong dan mempercepat peningkatan produk-

tivitas sektor pertanian. “Sebab, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Pemda Muba.”

“Kerjasama ini sudah sesuai dengan visi dan misi pembangunan sektor pertanian Kabupaten Muba untuk tahun 2012-2017. Oleh karena itu, kami menyambut baik gagasan yang dilontarkan PT Pertani dengan program GP3K,” papar Pahri.

“Masyarakat Muba lebih dari 80 persen menggantungkan ekonomi keluarga dari sektor pertanian. Oleh karena itu, program pembiayaan pasca panen ini akan bermanfaat dalam mengatasi kesulitan petani saat harga cenderung turun,” jelas Pahri.

“Melihat luasnya areal lahan pertanian di Muba, sudah sepantasnya di wilayah kami lebih dari tiga gudang SRG. Tetapi saat ini hanya ada satu dari bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan PT Pertani diharapkan di masa mendatang ada dukungan lain dari pemerintah pusat guna menambah gudang SRG,” jabar Pahri Azhari.

Sementara itu, Dirut PT Pertani, Dwi Ananto, mengatakan, PT Pertani sangat bangga bisa berkerjasama dan menjadi mitra Pemda Muba dalam mewujudkan visi dan misi 2012-2017 di sektor pertanian.

“Kerjasama dengan sejumlah Pemda sudah dilaksanakan sejak tahun 2011. Hasilnya cukup mengembirakan, dan petani sangat terbantu dalam mengatasi sulitnya memperoleh bibit unggul dan ketersediaan pupuk yang baik,” tandas Dwi Ananto. ▲



Kadisperindag, Sulut,
Sanny Parengkuan.

Sulut Tunjuk Swasta Kelola PLKA

Tahun 2012 Pemda Sulut tunjuk swasta pengelola PLKA guna meningkatkan nilai transaksi dan menciptakan perdagangan komoditi yang efektif dan efisien. Periode pertama PLKA Sulut tahun 2012 mencatatkan transaksi sebesar Rp 12,35 miliar.

Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode pertama tahun 2012 yang berlangsung di Manado pada 23 Februari lalu, mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 12,35 miliar. Nilai transaksi yang ditorehkan itu bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Sulut, selaku operator PLKA, dijadikan faktor pemicu berkembangnya pasar lelang profesional di Sulut.

Kepala Dinas Disperindag, Sulut, Sanny Parengkuan, mengatakan, dengan nilai transaksi PLKA yang senantiasa tinggi menunjukkan bahwa instrumen ini layak diselenggarakan secara profesional kemudian hari. Dan, guna menyelenggarakan PLKA yang profesional pihak Disperindag akan kerjasama dengan swasta.

"Kita sedang menjaring pihak swasta yang akan menjadi pelaksana pasar lelang Sulut. Ditargetkan tahun ini su-

dah ditunjuk pihak swasta yang menjadi pelaksananya," jelas Sanny Parengkuan.

Sanny menambahkan, keterlibatan pihak swasta dalam pelaksana PLKA, dengan harapan kegiatan perdagangan forward ini menjadi lebih profesional. "Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku pembina dan pengawas pasar lelang sudah diprogramkan PLKA dikelola secara profesional. Karena instrumen ini merupakan salah satu alternatif pemasaran komoditas unggulan daerah."

"Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan seleksi pihak swasta yang mampu melaksanakan pasar lelang secara profesional," kata Sanny.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Disperindag Sulut, Ria Dunggio, juga mengatakan dengan nada yang sama, bahwa pihaknya sedang memilih beberapa perusahaan swasta, koperasi, badan usaha daerah yang akan ditunjuk sebagai pelaksana PLKA Sulut.

"Yang paling penting, sebagai persyaratan pihak ketiga jadi pelaksana PLKA yakni punya kemampuan dalam bidang perdagangan forward, karena arah yang dituju tercipta profesionalitas," jelas Ria.

Lebih jauh dikatakan Ria, pemerintah daerah tetap mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pasar lelang, tetapi pelaksananya diharapkan pihak di luar pemerintah sebagai penggerak.

PLKA Sulut selama tahun 2012, direncanakan berlangsung sebanyak sembilan kali penyelenggaraan. Dan untuk menyelenggarakan PLKA itu, Pemda Sulut telah mengalokasikan dana sebesar Rp 225 juta.

"Jadi, diharapkan dengan keterlibatan pihak ketiga sebagai pelaksana PLKA Provinsi Sulut, lebih banyak lagi penjual dan pembeli terlibat, dengan demikian tujuannya sebagai salah satu alternatif pemasaran dapat tercapai," Ria Dunggio.



Jagung

Pelaksanaan PLKA Sulut periode pertama ditahun 2012 memperdagangkan sebanyak 22 jenis komoditi unggulan daerah. Dalam penyelenggaraan pasar lelang itu, nilai transaksi komoditi jagung mendominasi perdagangan sebesar Rp 10,09 miliar atau sekitar 81,72 persen.

“Besarnya transaksi komoditi jagung dalam penyelenggaraan pasar lelang kali ini disebabkan keberhasilan para petani Sulut dalam budidaya tanaman jagung. Oleh karena itu, kami sangat berharap pasar lelang ini bisa menjadi sarana pemasaran efektif bagi para petani jagung. Dengan demikian para petani lebih bersemangat berproduksi dari adanya jaminan pasar serta harga yang stabil,” terang Sanny.

Selain komoditi jagung, PLKA Sulut juga mencatatkan transaksi komoditi kopra yang juga menjadi komoditi unggulan daerah. Dalam penyelenggaraan PLKA itu, transaksi komoditi kopra mencapai nilai Rp 1,8 miliar dari sebanyak 250 ton. Selanjutnya, komoditi gula merah Rp 95,25 juta, jahe merah Rp 196 ribu (28 ton), kacang merah Rp

60 juta (5 ton), kayu kelapa Rp 44 juta (40 kubik), salak Rp 16 juta (2000 Kg), udang air tawar Rp 37,5 juta (750 Kg).

Di sisi lain, Sanny Parengkuan mengatakan, bahwa pihaknya membuka peluang bagi Pemda dari daerah lain di Sulut untuk memperdagangkan komoditi unggulan daerah. “Dengan adanya PLKA ini kami akan mencari pembelinya. Karena itu bila ada komoditas unggulan yang kesulitan pemasaran, supaya didaftarkan menjadi peserta PLKA Sulut.”

“Hadirnya PLKA maka persoalan pasar bukan menjadi masalah lagi bagi Sulut, karena yang penting bagaimana hubungan dengan pembeli,” imbuh Sanny Parengkuan.

Menurut Sanny, saat ini pun sudah ada dua kabupaten yang aktif dalam kegiatan PLKA Sulut. “Harapan kami, setiap penyelenggaraan PLKA semua Pemda Kabupaten-Kota bisa mengirimkan komoditi unggulan daerahnya sehingga PLKA menjadi ajang pemasaran hasil produksi unggulan petani,” kata Sanny.

“PLKA sebagai perdagangan forward mempunyai keunggulan, diantaranya harga jual komoditas jadi lebih

pasti, karena persetujuan ataupun kontrak dengan pembeli atau pasar, sebelum barang diterima pembeli,” katanya.

Selain itu, petani atau pun industri kecil dapat memperoleh harga jual lebih tinggi, karena dengan PLKA, rantai distribusi menjadi lebih pendek, dimana industri ataupun pedagang pengecer besar seperti pasar swalayan langsung menjadi pembeli.

“Karena itu pemerintah kabupaten/kota agar lebih mendorong instansi terkait dan penghasil produk pertanian, perikanan dan industri untuk ikut serta dalam penyelenggaraan PLKA Sulut,” tandas Sanny Parengkuan. ▲

“Harapan kami, setiap penyelenggaraan PLKA semua Pemda Kabupaten-Kota bisa mengirimkan komoditi unggulan daerahnya sehingga PLKA menjadi ajang pemasaran hasil produksi unggulan petani,”

Bappebti Tutup Tiga PLKA

Bappebti sebagai institusi pembina dan pengawas penyelenggaraan pasar lelang forward yang terdapat disejumlah daerah pada tahun 2011 menutup tiga pasar lelang komoditi agro (PLKA) karena tidak ada transaksi.

“PLKA yang terpaksa ditutup itu yakni Sumatera Utara, Bengkulu dan Kalimantan Timur,” kata KaSubag Pengawasan dan Pengelola Agunan dan Lembaga Sertifikasi, Bappebti, Yuli Edi Subagio, pada sosialisasi pasar lelang dan sistem resi gudang, di Manado, 22 Februari 2012.

Selain tidak ada transaksi, tiga PLKA tersebut ditutup karena dirasakan tidak lagi memberi manfaat terhadap perekonomian daerah bersangkutan, tambah Yuli Edi Subagio.

“Salah satu tujuan didirikannya

pasar lelang komoditi adalah guna mendorong berkembangnya komoditas unggulan dari daerah tersebut. Tetapi di ketiga daerah itu justru tidak terlihat adanya perkembangan pasar lelang, sehingga diputuskan untuk ditutup,” katanya.

Dengan penutupan ketiga PLKA tersebut, jumlah provinsi yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan forward tersebut berkurang menjadi 16 daerah dari sebelumnya 19 daerah.

Edi Subagio mengatakan, pasar lelang perlu didorong lagi di daerah penyelenggara, karena ada tren penurunan transaksi dalam dua tahun terakhir.

“Transaksi PLKA tahun 2011 hanya sebesar Rp 1,18 triliun, turun cukup tinggi dibanding 2010 yang mencapai Rp 1,56 triliun. Karena itu perlu ada

perhatian lebih serius dari pemerintah daerah penyelenggara,” tegas Edi Subagio.

Bappebti, kata Edi Subagio, sudah menyiapkan beberapa kebijakan yang diarahkan mendorong pertumbuhan transaksi PLKA. “Ada beberapa kebijakan yang bisa mendorong PLKA, di antaranya diupayakan segera terwujud lembaga penjamin, serta penerapan sistem ‘online’ dalam proses transaksi PLKA.”

“Kehadiran lembaga penjamin pasar lelang sangat penting untuk menghindari terjadinya gagal serah dari transaksi yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Selain itu, pelaksanaan PLKA akan diserahkan kepada pihak swasta sehingga dikelola secara profesional,” jelas Yuli Edi Subagio. ▲



Prof. Hendrawan Supratikno MBA., Ph.D

Pembiayaan SRG Seharusnya 85 %

Pengantar Redaksi.

Pembiayaan alternatif pasca panen dengan skema sistem resi gudang (SRG) berangsur-angsur memasyarakat dengan intensifikasi program pemerintah membangun gudang SRG di berbagai daerah. Hingga tahun 2012 pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah membangun sebanyak 80 unit gudang SRG di 72 kabupaten/kota dari 18 provinsi. Pembangunan gudang SRG di masa mendatang akan terus didorong mengingat luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya komoditi yang dapat disimpan untuk dijadikan jaminan pembiayaan SRG. Gudang milik BUMN, swasta dan koperasi pun diharapkan bisa

digunakan sebagai gudang penyimpanan komoditi.

Selain membangun gudang yang lebih banyak, pemerintah juga diharapkan memberi nilai pembiayaan yang lebih tinggi bagi petani. Petani pantas menerima nilai pembiayaan sebesar 85 persen dari nilai komoditi yang disimpan di gudang. Dengan demikian petani lebih leluasa menggunakan dana pembiayaan yang diperoleh dari perbankan. Di sisi lain, petani akan terpacu berproduksi karena memiliki jaminan harga dan pasar.

Demikian antara lain wawancara Redaksi Buletin Kontrak Berjangka dengan Prof. Hendrawan Supratikno MBA., Ph.D, Anggota Komisi VI DPR RI, baru-baru ini. Selengkapnya petikan wawancara itu sebagai berikut;

Tanya (T). *Dari prespektif Bapak sudah sejauh mana implementasi SRG?*

Jawab (J). Dengan skema pembiayaan pasca panen ini, petani memiliki pilihan untuk memperoleh pembiayaan, sehingga kalau pada saat petani sedang panen, apalagi panen raya, terjadi over suplay- pasokan berlebih sehingga harga turun, nah petani memperoleh pilihan menunda jual dengan cara menyimpan komoditinya di gudang. Kemudian ketika harga sudah membaik dapat dijual. Filosofi memberi pilihan lebih banyak kepada produsen atau petani ini penting. Karena teori ekonomi dasar mengatakan kalau orang memiliki pilihan yang lebih banyak, potensinya akan hidup lebih baik. 'Nah dengan SRG itu, maka petani/produsen akan memiliki pilihan yang lebih banyak. 'Nah, tentu sosialisasi UU SRG harus baik, kemudian

infrastruktur, sarana dan prasarana gudangnya juga harus bagus. Jangan sampai letak gudang jauh dari sentra produksi, jangan sampai jalan menuju gudang itu rusak, jangan sampai gudangnya becek, dan seterusnya. Karena kalau seperti itu maka petani akan sulit untuk menyimpan produk hasil pertaniannya ke gudang-gudang itu. Dengan kondisi seperti itu, petani tidak di eksploitir pada saat panen. Misi SRG ini sangat mulia, atas dasar itu pula Komisi VI DPR RI mengamandem UU SRG, menjadi UU No. 9 Tahun 2011.

(T). *Menurut Bapak, sampai kapan batas pemerintah membangun gudang SRG?*

(J). Gudang-gudang SRG itu harus terus dibangun. Ibaratnya, lebih bagus membangun pabrik dari pada impor terus. Jadi Komisi

VI akan terus mendukung dalam program pengadaan gudang ini. Tetapi sekali lagi, gudang-gudang itu harus distandardisasi dengan baik, spesifikasinya harus memadai sesuai dengan ketentuan SNI. Ini catatan untuk Bappebti, kami pernah melakukan kunjungan ke gudang SRG, ketika hujan deras depannya becek bekas banjir. Gudang SRG di Demak juga demikian, saat hujan kemasukan air. Jadi, gudang ini jangan sembarangan, karena manajemen gudang menjadi salah satu bagian dari Sislognas (sistem logistik nasional) yang efisien. Kalau kita tidak memiliki gudang-gudang dalam jumlah yang tersedia yang cukup, dengan manajemen yang baik, dengan kualitas yang baik, akan bahaya. Karena apa? Kita akan menghadapi kerawanan pangan, petaninya tidak sejahtera dan posisi tawarnya lemah,.



“Gudang menjadi salah satu bagian dari Sislognas (sistem logistik nasional) yang efisien. Kalau kita tidak memiliki gudang-gudang dalam jumlah yang tersedia yang cukup, dengan manajemen yang baik, dengan kualitas yang baik, akan bahaya.”



(T). Untuk melibatkan pihak swasta dan koperasi pemilik gudang, bagaimana pak?

(J). Boleh saja. Bahkan salah satu dampak yang kami harapkan dari munculnya UU SRG yang baru itu, adalah mendorong atau menarik paling tidak untuk para investor agar mau berinvestasi dengan mengadakan gudang-gudang yang bagus, dengan peralatan yang memadai, kalau gudang-gudang seperti itu bisa petani masuk ke gudang-gudang itu nanti disertifikasi. Nah, kemudian mengeluarkan resi untuk finacingnya.

(T). Tetapi saat ini bisnis pergudangan SRG mungkin belum menguntungkan bagi swasta, bagaimana mengatasinya?

(J). Itu karena sistem sosialisasinya belum maksimal. Tapi swasta yang bergerak dalam bisnis pergudangan sudah banyak. Agar bisnis ini menarik bagi swasta, perusahaan pergudangan harus ada mekanisme kerjasama dengan sektor keuangan. Karena kalau dia mengeluarkan finacing, kemudian orang datang ke gudang untuk menyimpan, kemudian ke bank tidak kesulitan untuk mencairkan pembiayaan, pasti akan menarik bagi swasta. Ini sama dengan orang yang mengeluarkan kartu kredit. Bunga kartu kredit bayangkan 2,75 persen perbulan, jauh lebih untung kalau uang itu didepositokan, karena satu tahun hanya 5-6 persen. Gudang juga seperti itu, dengan mengeluarkan SRG, dia bisa chard, katakanlah perbulan 2,5 persen. Kalau petani misalkan menyimpan bawang 2 atau 3 bulan menjadi 7,5 persen. Jauh lebih untung

dia punya uang disimpan di Bank.

(T). Sejumlah perusahaan BUMN tahun 2011 lalu mencetuskan program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi), bagaimana menurut Bapak?

(J). Betul, gerakan itu sudah bagus, karena itu kami berharap Bappebti betul-betul menggunakan gudang ini sebagai instrument kebijakan untuk meningkatkan efisiensi Sislognas. Karena Silognas ini merupakan salah satu instrument untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberikan banyak pilihan kepada petani. Terus kemudian gudang ini juga untuk Ketahanan Pangan Nasional. Jadi sekali lagi Ketahanan Pangan, Sislognas yang efisien dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(T). Menurut Bapak, kebijakan apa lagi yang harus dijalankan pemerintah agar SRG ini lebih cepat diterima masyarakat dan meluas ke seluruh nusantara?

(J). Kami merasa bahwa 70 % nilai komoditi yang dikeluarkan oleh bank sebagai pembiayaan terlalu kecil. Menurut saya sebesar 85 %.

(T). Tetapi itukan ketentuan dari Bank Indonesia (BI)?

(J). Memang itu ketentuan BI. Tetapi kalau kita melihat tujuan dan manfaatnya akan beda. Ketentuan 70 % itu 'kan kalau kita meminjam uang ke bank untuk keperluan lain. Sedangkan SRG ini kan tujuannya sangat mulia, meningkatkan kesejahteraan petani

dan yang lebih penting lagi untuk ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kita akan desak pemerintah supaya dinaikkan, agar petani juga memperoleh uang liquid yang lebih besar. Sehingga petani pun mampu melakukan perencanaan keuangan.

(T). Untuk usulan itu sudah sejauh mana dibicarakan?

(J). Kami akan mengusulkan itu lewat Kementerian Perdagangan. Itu salah satu upaya mereka juga, karena margin dari produk-produk pertanian saya lihat tidak terlalu besar, kalau saya simpan 2 atau 3 bulan, selain petani membutuhkan modal kerja, margin keuntungan mereka tidak terlalu besar. Jadi inti dari sistem-sistem untuk meningkatkan kesejahteraan ini adalah mendorong supaya orang mempunyai intensif untuk masuk sistem yang kita buat, dalam hal ini SRG

(T). Hal lain yang menjadi sorotan Bapak dari SRG ini apa?

(J). Management pergudangan, gudang belum menjadi tempat yang diprioritaskan. Ini penting sekali, bayangkan satu sistem kedaulatan pangan tanpa gudang yang efisien, yang tidak terstandarisasi. Seharusnya, untuk gudang pangan tidak ada fleksibilitas dalam pengertian kompromi. Sertifikasi gudang harus baku dengan kontrol yang ketat, sebab kalau menyimpan di gudang, ada hama tikus, lembab dan sebagainya, maka bank tidak akan mau melakukan pembiayaan, bank akan menganggap risiko tinggi, sehingga tidak tertarik. Kan ini *how to many risk*. ▲



Agenda Foto



Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi bersama-sama menekan tombol tanda dimulainya perdagangan perdana pasar fisik timah INATIN. Disaat yang sama Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya menyerahkan izin peserta INATIN. Jakarta, 1 Februari 2012.



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya memberi sambutan saat rapat kerja PT. Pertani. Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara PT. Pertani dengan Bupati Kab. Muba dan Perpadi dalam rangka percepatan implementasi sistem resi gudang. Surabaya, 7 Februari 2012.



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya dan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintargo, menjadi narasumber dialog terbuka tentang perdagangan berjangka yang diselenggarakan PT. First State Futures. Kegiatan ini dalam rangka dua tahun beroprasinya PT. First State Futures. Surabaya, 23 Februari 2012.





Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya memberi arahan kepada peserta pelatihan perizinan *on line* bidang perdagangan berjangka. Diharapkan dengan perizinan secara *on line* lebih memudahkan dan mempercepat pelaku memperoleh izin. Pelatihan ini diikuti sebanyak 90 peserta. Jakarta, 16-17 Februari 2012.



Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya memberi sambutan pada seminar Monex Investor Club 2012. Kepala Bappebti menyampaikan apresiasi dan harapannya agar semua pihak dapat mendukung perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi, yang bermanfaat sebagai sarana pengelolaan risiko harga, pembentukan harga yang transparan, teratur, wajar, efisien, efektif, demi melindungi kepentingan semua pihak. Jakarta, 11 Februari 2012.



Sekretaris Bappebti Nizarli membuka ujian profesi wakil pialang berjangka. Ujian ini diikuti sebanyak 201 peserta, berasal dari perusahaan pialang di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Surabaya 16-18 Februari 2012.



Bappebti dan KPK Institusi Pencegah Korupsi & *Money Laundering*

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi sekaligus penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang (SRG), pada tanggal 22 Februari 2012 diundang untuk menyampaikan presentasi dihadapan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK menganggap Bappebti sebagai salah satu mitra pencegahan terjadinya tindakan korupsi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan SRG. Oleh karena itu, KPK mengundang Bappebti untuk presentasi di bidang apa saja potensi korupsi itu bisa terjadi,” jelas Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, baru-baru ini.

Kami pun menganggap undangan itu sebagai silaturahmi diantara institusi penegak hukum. Karena Bappebti sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditi dan SRG juga dipayungi undang-undang. Dan berdasarkan undang-undang tersebut, Bappebti memiliki mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik melanggar undang-undang dan peraturan, terang Alfons.

“Salah satu topik yang hangat pada sesi diskusi bersama KPK itu, yakni tentang potensi industri perdagangan berjangka komoditi sebagai sarana money laundering. Jadi kami jelaskan, potensi itu bisa saja terjadi di bidang investasi mana pun,” katanya.

Tetapi dalam penjelasan kami kepada KPK, tambah Alfons, di bidang perdagangan berjangka komoditi ada mekanisme

pencegahan dini tindakan pencucian uang. Mekanisme itu yakni, know your customer (KYC) yang dibakukan baik melalui peraturan Bappebti maupun peraturan tata-tertib bursa.

“Dengan mekanisme KYC, misalnya, seseorang pejabat pemerintahan tidak diperkenankan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi. Namun, bisa saja hal itu terjadi dengan memalsukan berbagai dokumen. Tetapi risikonya jika kemudian hari terbukti, maka perusahaan pialang akan ditindak sesuai peraturan,” jelas Alfons.

Menurut Alfons Samosir, di masa mendatang Bappebti dan KPK perlu melakukan kesepakatan kerjasama pencegahan dan tindakan korupsi atau praktik money laundering di bidang perdagangan berjangka komoditi dan SRG. ▲

Bappebti Batal Izin PT. Vickniks International

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membatalkan izin persetujuan pelatihan dan seminar yang diberikan kepada PT. Vickniks International. Pembatalan itu berdasarkan Surat Kepala Bappebti No. 107/Bappebti.3/SD/02/2012, tertanggal 29 Februari 2012.

“PT. Vickniks International sekitar bulan Desember 2011, meminta izin kepada Bappebti untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi di bidang perdagangan berjangka. Setelah permohonan mereka itu dipelajari, maka Bappebti memberi izin berdasarkan Surat Kepala Bappebti No. 772/Bappebti.3/SD/12/2011, tertanggal 21 Desember

2011,” jelas Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir.

“Semula rencana PT. Vickniks International menyelenggarakan kegiatan itu tanggal 3 dan 4 Maret 2012. Tetapi, berdasarkan pantauan Bappebti terhadap promosi atau iklan yang dimuat di Harian Kompas, tanggal 29 Februari 2012, ada beberapa hal penting yang dilanggar PT. Vickniks International. Itulah sebabnya Bappebti membatalkan izin penyelenggaraan edukasi yang sedianya diselenggarakan PT. Vickniks International pada tanggal 3 dan 4 Maret 2012 di Hotel Ciputra, Jakbar,” terang Alfons.

Menurut Alfons, terdapat pelanggaran peraturan dari pihak PT. Vickniks International berdasarkan Peraturan Kepala Bappebti No. 83/BAPPEBTI/

Per/06/2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

“Berdasarkan peraturan Bappebti itu, pelanggaran PT. Vickniks International, pertama, materi promosi atau iklan mengenai seminar forex yang dimuat pada surat kabar Harian Kompas, tidak sesuai dengan materi yang disampaikan kepada Bappebti dalam rangka memperoleh persetujuan pelatihan dan seminar. Kedua, materi promosi atau iklan tersebut tidak sesuai dengan fakta atau secara sengaja menghilangkan fakta sehingga menyesatkan masyarakat. Dengan cara, menjanjikan kemungkinan diperolehnya keuntungan tanpa mengemukakan terjadinya kerugian,” tandas Alfons Samosir. ▲

JFX Academy

Ajang Edukasi Masyarakat

Upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi tidak bisa dilakukan secara instan. Harus ada upaya berkesinambungan sehingga masyarakat dapat memetik manfaat ekonomis dari investasi di bidang perdagangan berjangka.

Dalam kaitan itu, tahun 2012 ini Jakarta Futures Exchange (JFX) merencanakan mendirikan JFX Academy. Lembaga tersebut ditujukan untuk mengedukasi masyarakat calon investor di bidang perdagangan berjangka komoditi.

"JFX Academy akan direalisasikan

berdiri tahun 2012 ini. Lembaga ini akan mengedukasi masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi," demikian diutarakan Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, disela-sela Rapat Kerja Anggaran (RKAT) Tahun 2012 JFX.

Sebenarnya, tambah Bihar, JFX Academy ini sudah masuk dalam program RKAT tahun 2011, lalu. Tetapi karena banyak kesibukan sepanjang tahun itu sehingga program tersebut tertunda.

JFX Academy merupakan salah satu sarana edukasi masyarakat dan menciptakan SDM profesional di bidang perdagangan berjangka komoditi. Hampir bisa dipastikan, SDM yang ada di industri

perdagangan berjangka komoditi saat ini belajar secara otodidak. Karena di institusi pendidikan formal belum ada ditemukan kurikulum atau modul tentang perdagangan berjangka komoditi.

"Modul tentang perdagangan berjangka komoditi yang akan diberikan JFX Academy sudah kami siapkan. Tinggal mencari tenaga pengajarnya. Jika tim pengajar JFX Academy sudah siap dalam waktu segera program ini akan kami sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi, harap ditunggu ya," imbuh Bihar Sakti Wibowo. ▲

Kontrak SPA Harus Miliki Izin



Produk-produk keuangan asing yang saat ini diperdagangkan secara bilateral dan dilaporkan transaksinya ke bursa berjangka, di masa mendatang diperdagangkan atas izin dari pemilik kontrak. Hal itu untuk menghindari tututan dari

sang pemilik kontrak berjangka dan upaya menghargai hak kekayaan intelektual (HAKI) pihak asing.

"Hingga saat ini pelaku pasar perdagangan berjangka di dalam negeri yang memperdagangkan kontrak keuangan asing dengan sistem perdagangan alternatif (SPA) belum mengantongi izin

dari pemilik kontrak. Oleh karena itu, ke depan Bappebti akan meminta bursa berjangka untuk mengantongi izin prinsip dari pemilik kontrak tersebut sebelum di perdagangkan," demikian diutarakan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintaryo, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Memang sampai saat ini belum ada protes dari pemilik kontrak keuangan tersebut terhadap pelaku pasar perdagangan berjangka di dalam negeri, katanya.

"Bisa saja mereka belum tahu kalau kontrak keuangan yang mereka miliki diperdagangkan di Indonesia. Tetapi bisa juga kelak mereka akan menuntut bursa berjangka," kata Robert lebih jauh.

"Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jadi kami pikir lebih baik bursa meminta izin dari mereka. Seperti halnya Bursa Efek Indonesia (BEI), meminta izin dari pemiliki kontrak indeks Nasdaq dan indeks Dow Jones. Dengan izin itu, BEI pun lebih leluasa mengatur perdagangan dari dua kontrak indeks yang berasal dari Amerika tersebut," jabar Robert. ▲



Harga Karet Capai Rekor Tertinggi



Harga kontrak berjangka komoditi karet mencapai rekor tertinggi dalam 4 bulan belakangan ini. Menurut para analis, kenaikan harga karet itu sejalan dengan kenaikan harga minyak bumi. Di sisi lain, didukung meningkatnya optimisme bahwa Yunani bakal mengamankan dana talangan kedua.

Harga kontrak penyerahan untuk bulan Juli 2012 naik menjadi 2,1 % berakhir pada 325,9 yen per kilogram atau US\$ 4.228 per ton. Harga itu merupakan harga penyelesaian tertinggi sejak

22 September 2011 di Tokyo Commodity Exchange. Harga karet yang berada di level US\$ 4.228 per ton telah melonjak 24 % sejak 4 bulan lalu.

Analisis Fujitomi Co, Kazuhiko Saito di Tokyo, mengatakan, harga karet berjangka juga menguat di tengah ekspektasi bahwa pasokan dari Thailand akan menurun di tengah musim rendah produksi. Selama periode ini pohon merontokkan daunnya dan produksi lateks melambat.

Sementara itu, harga karet fisik di Thailand juga diperdagangkan naik 0,8 % menjadi 127,80 baht atau sekitar US\$4,15 per kilogram. Kenaikan harga

itu didorong kebijakan pemerintah Thailand untuk membeli karet petani di atas harga pasar.

Data tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang cenderung turun juga ikut mempengaruhi harga karet. Dengan asumsi, industri manufaktur Amerika akan meningkat dan memerlukan bahan baku karet.

Bursa Shanghai yang juga memperdagangkan komoditi karet, harganya juga bergerak aktif. Untuk pengiriman bulan Mei 2012, harga karet bertengger di harga 28.605 yuan atau sekitar US\$ 4.500 per ton. ▲



Harga Kopi Meningkat Akibat Produksi Rendah

Harga kopi lokal sejak awal tahun 2012 terus mencatat kenaikan didorong rendahnya produksi kopi tahun lalu dan tingginya permintaan dunia. Pranoto Soesanto, Wakil Ketua Bidang Spesialisasi dan Industri Kopi, dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), mengatakan, kenaikan harga kopi di pasar internasional mendorong kenaikan harga kopi lokal karena pergerakan harga kopi lokal mengikuti

pergerakan harga internasional.

“Saat ini harga kopi robusta di pasar internasional sekitar US\$ 2.000 per ton. Ini berarti harga kopi robusta di tingkat petani sekitar Rp 15.000 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi dari harga pada Januari 2012 sebesar US\$ 1.800 per ton dengan harga kopi di tingkat petani domestik Rp 13.000 per kilogram,” jelas Pranoto.

Menurut Pranoto, harga kopi Indonesia relatif paling tinggi dari negara produsen lain seperti Vietnam.

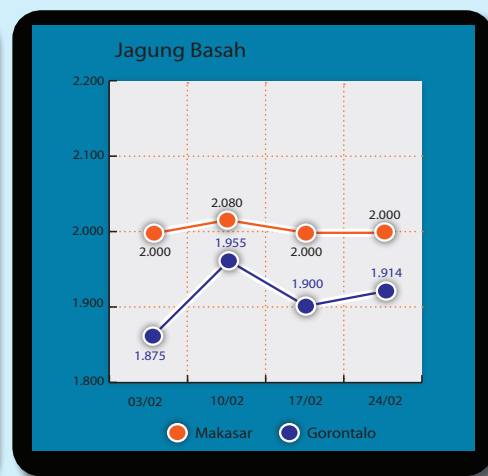
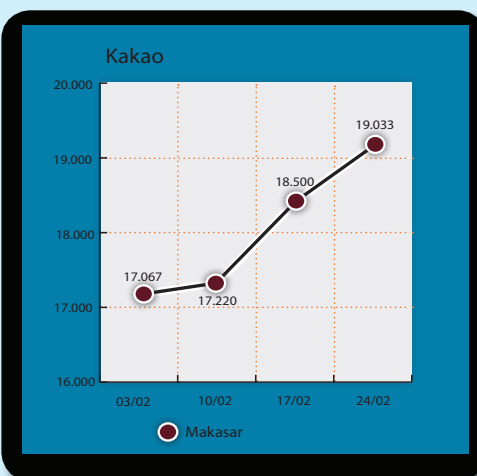
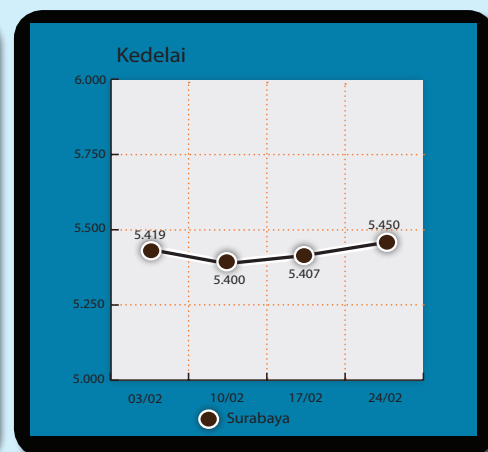
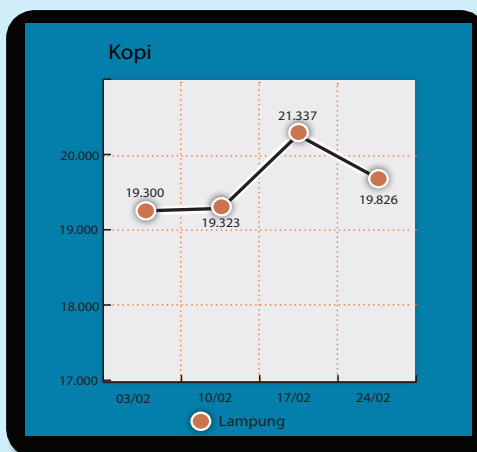
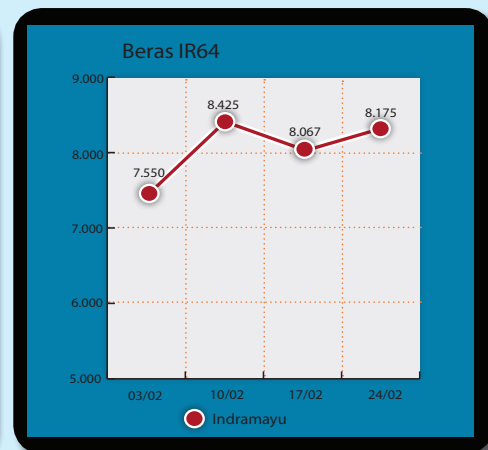
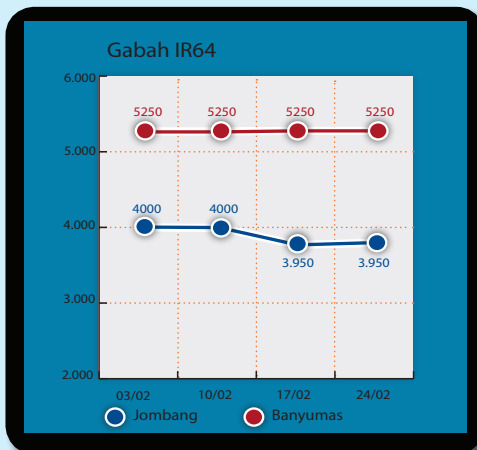
Sementara itu, Rachim Kartabrata,

Sekretaris Eksekutif AEKI, memperkirakan produksi kopi Indonesia tahun ini hanya akan mencapai 600.000 ribu ton. Produksi itu di bawah produksi tahun 2011 yang diperkirakan lebih rendah dari target awal sebesar 640.000 ton.

“Dari total produksi 600.000 ton, sekitar 25 % merupakan kopi jenis arabika dan sisanya 75 % kopi jenis robusta. Sementara konsumsi kopi domestik tahun ini diperkirakan sekitar 120.000 – 150.000 ton” jelas Rachim Kartabrata. ▲



Harga Komoditi (Rp/Kg)





Bunga Matahari Minyak Nabati Dari Masa ke Masa

Dinamai bunga matahari, karena memang bunga ini ketika merekah mirip dengan matahari yang sedang bersinar. Selain itu, bunga ini juga memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap ke arah matahari atau heliotropisme. Karena keindahan bunga ini, pemerintah Cina menjadikannya sebagai. Demikian pula negara bagian Kansas, Amerika Serikat, Peru, Rusia dan Ukraina menjadikam bunga matahari sebagai simbol-simbol kenegaraan. Dalam hal ideologi, bunga matahari menjadi simbol ideologi hijau, juga sebagai simbol dari “The Vegan Society”.

Di abad ke 19, bunga matahari dijadikan simbol pergerakan Aesthetic dan bahkan seorang Van Gogh, membuat karya dalam “Still Life” untuk bunga matahari.

Bunga dengan nama latin *Helianthus annuus* L, ini, berasal dari Amerika Utara, daerah di sekitar Mexico, Cile dan Peru. Tumbuhan ini telah dibudidayakan oleh orang-orang Indian Amerika Utara sejak ribuan tahun lalu. Selanjutnya tersebar ke Amerika Selatan dan menjadi salah satu sumber pangan bagi suku Inka.

Setelah penaklukan bangsa Eropa di daratan Amerika pada abad ke 16, bunga matahari diperkenalkan ke

Eropa dan berbagai penjuru dunia lainnya. Dan, semenjak abad ke-17 bijinya digunakan dalam campuran roti atau diolah sebagai pengganti kopi serta cokelat. Selanjutnya pada abad ke 19, bunga matahari digunakan sebagai salah satu sumber minyak nabati.

Di dunia, negara penghasil biji bunga matahari utama adalah Rusia dan Perancis. Sedangkan di kawasan Asia penghasil utamanya adalah Cina, India dan Turki. Di negara-negara tersebut biji bunga matahari umumnya diolah menjadi minyak, tetapi ada juga yang diolah menjadi makanan dan bahan baku kosmetik.

Tanaman bunga matahari masuk ke kawasan Indonesia diperkirakan sekitar tahun 1907. Bunga matahari dibawa masuk oleh alhi botani berkebangsaan Belanda. Di Indonesia, bunga ini mendapat banyak julukan. Di antaranya bunga panca matoari, teleng matoari, ledomata, kembang srengenge, kembang tampongare, bungong matuhori, sungeng, hingga purbanegara.

Semula, tanaman bunga matahari dibudidayakan sebagai tanaman hias bahkan juga sebagai tanaman liar yang banyak terdapat di Pulau Jawa dan di daerah lain. Kemudian bijinya dimanfaatkan sebagai kuaci dan sumber minyak untuk produk kosmetika.

Sentra budi daya tanaman bunga

matahari di Indonesia bisa ditemui di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk budidaya di Jawa Timur, tepatnya berada di kawasan Sengkaling, Malang ataupun di daerah Blitar. Produksi biji bunga matahari di daerah Blitar cukup tinggi, yakni 3 ton biji/hektar.

Bunga matahari merupakan tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran, yang umumnya dijadikan tanaman hias. Di balik itu, bunga matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak, dengan nilai ekonomis yang tinggi. Biasanya minyak nabati yang dihasilkan, digunakan dalam masakan, saus salad dan margarin. Selain itu, biji bunga matahari digunakan sebagai bahan baku pembuatan asam lemak, pembuatan margarin, bahan baku kosmetika dan obat-obatan.

Minyak biji bunga matahari memiliki kualitas dengan nilai hampir setara dengan minyak zaitun. Karena itu, ia digunakan secara luas sebagai pengganti minyak-minyak sayur. Kualitas terbaik dari minyak bunga matahari, didapat dari varietas biji hitam dengan kandungan minyak sekitar 50 hingga 60 persen. Saat ini pun, sejumlah ahli sedang melakukan penelitian tentang kemungkinan penggunaan minyak bunga matahari untuk bahan bakar biodiesel. ▲



Elok Dilihat Kaya Khasiat

Berdasarkan data dari Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan, biji bunga matahari ternyata mengandung gizi yang cukup lengkap. Ia mengandung minyak nabati dengan kadar kolesterol rendah, sehingga cocok dikonsumsi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi atau mengalami kelainan jantung.

Dari beberapa literatur juga diketahui, biji bunga matahari berkhasiat diuretic (peluruh kencing), expectorant, dan bisa digunakan untuk meringankan demam, flu, batuk, sakit tenggorokan, atau penyakit paru-paru. Menurut Hartwell (1967–1971), pakar botani dan pengobatan herbal dari Amerika, bunga dan biji bunga matahari telah lama digunakan sebagai obat tradisional oleh warga Venezuela untuk mengobati kanker. Kadang, mereka juga mencampurnya dengan anggur.

Menurut Ketua Bidang Pelayanan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) DKI Jakarta, Dr. Setiawan Dalimarta, seluruh bagian bunga matahari ternyata memiliki khasiat obat. Bunganya, kata Setiawan, untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi nyeri atau bersifat analgesik. Misalnya, untuk mengurangi sakit kepala, sakit gigi, nyeri

menstruasi, atau nyeri lambung.

Sedangkan bijinya, bisa untuk meningkatkan nafsu makan, mengobati disentri berdarah, meringankan sakit campak, atau meningkatkan gairah. Akarnya juga bermanfaat untuk infeksi saluran kencing, radang saluran napas, batuk rejan dan keputihan. Dari daunnya, juga dimanfaatkan untuk malaria dan anti radang. Selain itu, sumsum dari batang dan dasar bunga (reseptaculum) yang berisi hemicellulose, juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati kanker, misalnya kanker lambung dan kanker esophagus.

Sementara itu, dari kacamata Ahli Teknologi Pangan dan Gizi, IPB, Prof. DR. Ir. Made Astawan, MS, bunga matahari juga bermanfaat sebagai resep awet muda dan selalu terlihat cantik. Menurut Made Astawan, biji bunga matahari merupakan sumber vitamin E yang sangat baik. Konsumsi 100 gram biji bunga matahari dapat memenuhi 250,9 % kebutuhan tubuh akan vitamin E dalam sehari.

Vitamin E merupakan salah satu vitamin antioksidan yang berfungsi untuk melindungi kerusakan sel-sel tubuh akibat serangan radikal bebas. Berkat anti oksidan inilah, tubuh dapat dipertahankan untuk selalu tampak bugar dan awet muda. Vitamin E juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, melindungi sel-sel kulit akibat radikal bebas, melindungi kerusakan DNA sel-sel kulit, memperbaiki kerja

insulin, mencegah penyumbatan pembuluh darah, dan lain-lain.

Made Astawan menambahkan, biji bunga matahari juga merupakan sumber asam lemak omega-6 yang sangat baik. Omega-6 berperan penting untuk mengatur kerja kardiovaskuler, seperti tekanan darah, kadar kolesterol, fungsi hormonal, kekebalan tubuh, serta pembentuk membran sel dan sel-sel syaraf. Oleh karena itu, biji bunga matahari sangat baik untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi.

Untuk mengatasi penyakit beri-beri. Biji bunga matahari juga merupakan sumber asam folat yang baik. Asam folat merupakan zat gizi esensial dan merupakan bagian dari vitamin B kompleks. Asam folat sangat penting bagi wanita hamil. Folat bermanfaat untuk mencegah terjadinya neural tube defect (NTD), yaitu cacat bawaan pada bayi yang terjadi karena kekurangan asam folat ketika janin dalam kandungan ibu.

Penelitian Czeizel tahun 1993 di Hongaria, memperlihatkan bahwa konsumsi asam folat sebanyak 0,4 mg per hari sebelum hamil dapat menurunkan risiko NTD sebesar 50%. Sementara itu, penelitian Berry dan rekannya di Cina tahun 1999 menemukan bahwa resiko NTD bisa diturunkan sebanyak 85 % dengan cara mengkonsumsi asam folat sebesar 0,4 miligram sebelum dan di awal kehamilan. ▲

Resep pengobatan alternatif bunga matahari

1. Sakit kepala: bunga 25-30 gram direbus bersama 1 telur ayam (tidak dipecahkan) dalam 3 gelas air hingga tinggal setengah gelas. Minum sesudah makan, 2 kali sehari.
2. Radang payudara (mastitis): ambil beberapa kepala bunga (tanpa biji) dipotong halus, lalu dijemur. Setelah kering, disangrai sampai hangus kemudian digiling sampai halus (jadi tepung). Ambil 10-15 gram, campur dengan sedikit arak putih, gula secukupnya, dan setengah gelas air hangat. Minum 3 kali sehari.
3. Rematik: kepala bunga digodok sampai jadi seperti kanji, dinginkan lalu tempelkan (borehkan) pada tempat yang sakit.
4. Sulit buang air besar dan air kecil: rebus 15-30 gram akar segar dengan 4 gelas air hingga menyisakan 2 gelas. Dinginkan dan sarung. Minum 2 kali masing-masing 1 gelas.
5. Disentri : 30 gram biji diseduh, kemudian ditim selama 1 jam. Setelah diangkat, tambahkan gula batu secukupnya lalu minum.



Peluang & Tantangan SRG

Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai instrumen pembiayaan alternatif pasca panen, dikembangkan pemerintah sejak tahun 2006 ditandai dengan keluarnya Undang-undang No. 9/2006, tentang sistem resi gudang. Dan untuk memberi kepastian dan jaminan pembiayaan SRG yang dilakukan lembaga keuangan, pemerintah telah mengamandemen undang-undang SRG menjadi Undang-undang No. 9/2011.

Instrumen ini dikembangkan pemerintah untuk memberi kemudahan kepada petani dalam memperoleh pembiayaan

murah dengan jaminan komoditi. Di sisi lain, sebagai solusi bagi petani menghindari harga jual rendah di saat panen raya yang cenderung rendah.

Upaya implementasi sistem pembiayaan ini kepada para pelaku terutama pada petani tentu tidak mudah. Karena, guna mendapatkan pembiayaan tersebut, petani perlu mengubah paradigma dan melakukan berbagai persiapan. Namun, dibalik itu terdapat sejumlah manfaat dan keuntungan dari sistem pembiayaan ini. Tantangan dan keuntungan dari implementasi sistem pembiayaan tersebut berikut ini dijabarkan.

LANGKAH – LANGKAH YG DILAKUKAN UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI SRG

- Sosialisasi dan pertemuan teknis dengan para petani, pelaku usaha, pemerintah daerah, kalangan perbankan (Bank Indonesia, bank BUMN dan Swasta) serta instansi lain yang terkait.
- Penyediaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) bagi petani, kelompok tani, gapoktan dan koperasi tani;
- Pembangunan 41 gudang (35 flat & 6 silo) di 34 kabupaten melalui Dana Stimulus Fiskal DEPDA TA 2009, 12 gudang di 12 kabupaten melalui Dana APBN-P 2010, 14 gudang di 14 kabupaten melalui DAK 2011 dan 14 gudang di 14 kabupaten melalui DAK 2012;
- Pengadaan Mesin Pengering (*dryer*) di gudang-gudang Stimulus Fiskal;
- Kerjasama dengan kementerian dan instansi terkait dalam melakukan penyediaan peralatan pasca panen, peningkatan Mutu Hasil Pertanian, sosialisasi SRG serta hal-hal lain terkait Percepatan Pelaksanaan SRG serta Kerjasama Teknis dengan IFC-World Bank;
- Pelatihan, Bimbingan Teknis dan penyusunan Standard Operasional Baku bagi calon Pengelola Gudang dan UKM dan Tenaga Inspektur Badan Pengawas (Bappebti) di dalam dan luar negeri;
- Pelatihan Tenaga Uji Mutu Komoditi, dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang (SRG);
- Pengembangan Pasar Lelang sebagai sarana/akses pemasaran bagi komoditi yang di-resigudangkan
- Penyediaan Sistem Informasi Resi Gudang, Sistem Informasi Harga dan Sistem Informasi Pengawasan SRG; Penyiapan Lembaga Jaminan Resi Gudang melalui Amademen UU No 9 Tahun 2006 melalui UU No 9 Tahun 2011.

TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha (khususnya petani dan koperasi), dan dunia perbankan terhadap mekanisme dan manfaat Sistem Resi Gudang;
- Mutu komoditi yang dihasilkan petani/kelompok tani belum memenuhi standard mutu yang ditetapkan dalam SRG;
- Sinergi antar instansi pemerintah di pusat & daerah, sektor swasta serta pelaku usaha terkait belum optimal khususnya dalam penanganan komoditi pertanian pada masa pra-panen, panen hingga pasca panen;
- Masih kurangnya sarana dan peralatan seperti Mesin Pengering (*dryer*), Mesin Perontok, Alat Pengukur Kadar Air, maupun Alat Sortasi, serta sarana mesin penggilingan gabah (*ricemill*), sehingga nilai penjualan komoditas petani belum optimal;
- Masih terbatasnya akses pasar oleh petani atau koperasi termasuk kesiapan *standby buyer*.

GUDANG DAK 2012

I. DI ACEH

1. Kab. Aceh Tengah

II SUMSEL

1. Kota Pagar Alam

III LAMPUNG

1. Kab. Lampung Barat

IV JAWA BARAT

1. Kab. Tasikmalaya

V. BANTEN

1. Kab. Pandeglang

VI JAWA TENGAH

1 Kab. Kebumen

VII JAWA TIMUR

1 Kab. Bojonegoro

2 Kab. Jember

3 Kab. Kediri

4. Kab. Malang

VIII NTT

Kab. Kupang

IX NTB

1. Kab. Lombok Timur

X SULUT

1. Kab. Bolaang Mangondow

XI SULSEL

1. Kab. Luwu



PELUANG PEMANFAATAN SRG BAGI STAKEHOLDERS

PETANI PRODUSEN

- Mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan).
- Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan.
- Mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah.
- Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar.

PERGUDANGAN

- Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha terkait.
- Mendapatkan income dari jasa pergudangan

PERUSAHAAN PENGGUNA KOMODITI /PROCESSOR

- Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yg berkualitas.
- Mengurangi biaya penyimpanan.
- Perencanaan *supply* yang lebih baik.

LEMBAGA KEUANGAN (BANK/NON-BANK)

- Tumbuhnya peluang baru: Jasa Keuangan di daerah (Propinsi & Kabupaten).
- Perlindungan yang tinggi atas Jaminan
- Jaminan bersifat Liquid.

- Aktivitas penyaluran kredit yang aman dan menguntungkan.
- Pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan bagi petani/UKM berupa kredit Resi Gudang serta produk perbankan lainnya (tabungan, deposito dll).
- Pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor (SKBDN dan L/C)

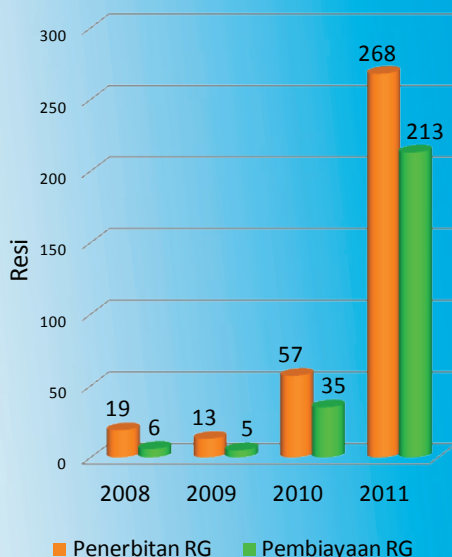
PEDAGANG / EKSPORTIR

- Ketersediaan atas volume dan kualitas. *Supply* tersedia sepanjang musim.
- Terdapatnya pembiayaan bagi perdagangan (Ekspor)
- Resi Gudang sebagai dokumen transaksi *Letter of Credit* akan menambah keyakinan para pihak termasuk bank (issuing bank & nominated bank)
- Mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam transaksi ekspor

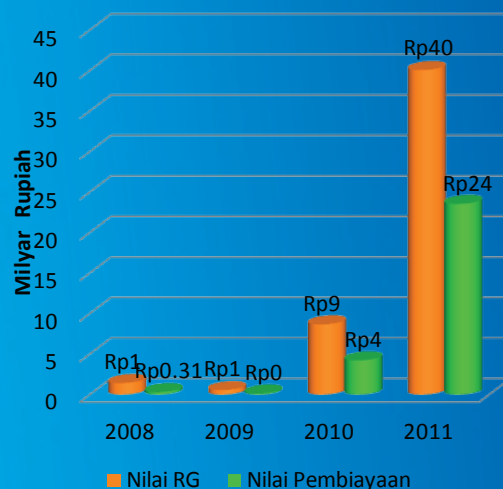
PEREKONOMIAN DAERAH/NASIONAL

- Mendorong tumbuhnya pelaku usaha (petani produsen/eksportir), industri pergudangan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pengujian mutu, dll di daerah.
- Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang lebih efisien. ▲

Penerbitan dan Pembiayaan Resi Gudang



Nilai Resi Gudang dan Pembiayaannya



→ Sumber : BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan

→ **) sampai dengan 26 Januari 2012



Dongkrak Multilateal Ciptakan Pedagang Perseorangan

*) Eddy SL Purba, pemerhati perdagangan berjangka komoditi.

Perdagangan kontrak berjangka komoditi primer di bursa berjangka tanah air tahun 2011 secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2010. Jika ritme dan semangat para pelaku pasar seperti di tahun 2011 terus terpelihara, atau bahkan bisa ditingkatkan lagi maka besar kemungkinan transaksi kontrak berjangka komoditi primer untuk tahun 2012 juga akan mengingkat pesat.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) per November 2011, kontrak berjangka komoditi primer atau dikenal dengan kontrak berjangka multilateral terjadi peningkatan sekitar 266,16 persen dari tahun 2010. Atau, transaksi kontrak berjangka multilateral di tahun 2011 mencapai 852.415 lot sedangkan di tahun 2010 hanya 232.797 lot.

Melihat performa bursa berjangka Indonesia itu, untuk tahun 2012 diyakini kontrak berjangka multilateral bisa menembus angka 1 juta lot. Hal itu bisa tercapai dengan munculnya produk-produk baru kontrak berjangka komoditi dari dua bursa berjangka di tanah air. Seperti diketahui, Bursa Berjangka Jakarta atau saat ini dikenal dengan Jakarta Futures Exchange (JFX) pada 15 Desember 2011 telah meluncurkan kontrak baru. Yakni, kontrak berjangka komoditi kakao, dan dalam waktu tidak lama lagi JFX

akan menawarkan kontrak berjangka komoditi kopi dan batubara.

Demikian pula dengan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), telah memperdagangkan kontrak berjangka komoditi olein atau minyak goreng pada 9 Desember 2011. Selain itu, di tahun 2012 BKDI juga merencanakan memperdagangkan komoditi timah, karet dan batubara.

Apa pentingnya peningkatan kontrak berjangka multilateral ini bagi masyarakat Indonesia?

Tentu saja kontrak berjangka multilateral itu berdampak pada perekonomian nasional dan petani produsen. Dari sisi petani produsen, kontrak berjangka multilateral tersebut dapat dijadikan sebagai referensi harga jual komoditi. Misalnya, ketika harga di bursa berjangka relatif tinggi tetapi di tingkat petani rendah, maka petani bisa mempertahankan harga jualnya yang sesuai dengan harga bursa. Di sisi lain, dengan kontrak berjangka multilateral petani bisa melakukan lindung nilai.

Bagi pemerintah, tingginya volume transaksi kontrak berjangka multilateral merupakan cermin efektifitas berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Di samping itu, instrumen perdagangan berjangka komoditi dapat dijadikan sebagai sarana mengambil kebijakan baru.

Pertengahan tahun 2011, lalu, misalnya, pemerintah telah mengacu harga crude palm oil (CPO) yang diperdagangkan di BKDI sebagai salah satu basis perhitungan Bea Keluar CPO. Selain itu, pemerintah membatasi

ekspor kakao dengan meningkatkan Bea Keluar dengan harapan industri hilir kakao berkembang di tanah air. Itu artinya, pelaku kakao terutamanya dari dalam negeri digiring masuk bursa berjangka untuk dapat melakukan mekanisme lindung nilai dan menjadikan harga di bursa sebagai referensi harga kakao di tingkat petani.

Jadi, berangkat dari kinerja dua bursa berjangka itu, sejatinya mekanisme pembentukan harga komoditi di dalam negeri sudah tercipta. Sehingga tugas bersama saat ini, baik stakholdeer maupun pelaku komoditi yakni meningkatkan likuiditas bursa menjadi lebih menarik bagi pelaku pasar internasional dan memiliki keinginan untuk bertransaksi di dalam negeri.

Pedagang Perseorangan

Salah satu strategi meningkatkan likuiditas bursa berjangka yang perlu mendapat perhatian serius baik Bappebti sebagai regulator maupun bursa berjangka, adalah menyuburkan peran pedagang berjangka perseorangan.

Pada struktur industri perdagangan berjangka di tanah air, pedagang berjangka perseorangan diakui keberadaanya dan mendapat izin dari regulator. Berdasarkan regulasi yang ada, pedagang berjangka perseorangan melakukan transaksi untuk dirinya sendiri.

“ untuk menyuburkan peran pedagang berjangka perseorangan, regulator dan bursa berjangka perlu memikirkan formula fleksibilitas terkait perizinan, permodalan dan fasilitas perdagangan. Jika hal itu bisa disederhanakan tanpa melanggar aturan yang ada, tentunya kelompok pelaku pasar ini menarik bagi masyarakat awam. ”

Bedanya pedagang berjangka perseorangan dengan investor adalah, investor bertransaksi harus melalui perusahaan pialang berjangka. Sedangkan pedagang berjangka perseorangan langsung bertransaksi ke bursa berjangka.

Namun saat ini, keberadaan pedagang berjangka perseorangan belum tampak perannya pada industri perdagangan berjangka di tanah air. Kalau pun ada pedagang perseorangan bertransaksi di bursa berjangka, perannya belum signifikan.

Nah, untuk menyuburkan peran pedagang berjangka perseorangan, regulator dan bursa berjangka perlu memikirkan formula fleksibilitas terkait perizinan, permodalan dan fasilitas perdagangan. Jika hal itu bisa disederhanakan tanpa melanggar aturan yang ada, tentunya kelompok pelaku pasar ini menarik bagi masyarakat awam.

Di samping itu, regulator dan bursa berjangka harus terus menerus mengedukasi masyarakat tentang tujuan dan manfaat ekonomis dari pedagang perseorangan. Menurut hemat penulis, adalah tidak tabu untuk mengutarakan lebih rinci tentang manfaat ekonomis dari pedagang perseorangan. Karena ini adalah kegiatan bisnis, maka yang pertama

ada dibenak masyarakat adalah keuntungan dari bisnis tersebut. Jika masyarakat tertarik dengan keuntungan dari kegiatan perdagangan berjangka, jelas kelompok pedagang berjangka perseorangan akan tumbuh subur di dalam negeri.

Bilateral

Mengulas tentang aktivitas bursa berjangka di dalam negeri agaknya kurang lengkap jika tidak menyinggung transaksi bilateral, atau dikenal dengan over the counter (OTC). Di Indonesia perdagangan OTC disederhanakan dengan istilah sistem perdagangan alternatif (SPA).

Transaksi SPA di dalam negeri hingga saat ini hanya ditemukan di JFX. Sedangkan di BKDI, pihak regulator belum memberi izin perdagangan bilateral di bursa itu. Kemungkinan hal itu menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah pasca amandemen Undang-undang No. 32/1997, menjadi Undang-undang No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi.

Berdasarkan data Bappebti yang diperoleh per November 2011, transaksi SPA masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011 pertumbuhan perdagangan

bilateral JFX mencapai 28,21 persen dibandingkan tahun 2010, dengan volume transaksi sebesar 6.915.450 lot. Sedangkan periode 2010 tercatat sebesar 5.393.768 lot.

Agaknya, perdagangan bilateral JFX ini merupakan instrumen bisnis yang tidak ada surutnya. Sejak tahun 2006, rata-rata perdagangan bilateral JFX mencapai 95,9 persen dari total transaksi. Sedangkan sisanya sekitar 4,1 persen merupakan perdagangan multilateral dan penyaluran amanat ke bursa luar negeri (PALN).

Dari dua jenis transaksi perdagangan berjangka di bursa berjangka tanah air tersebut, dapat disimpulkan bahwa profil investor perdagangan berjangka Indonesia merupakan kelompok spekulator. Menginvestasikan sejumlah dana yang dimiliki untuk mengambil keuntungan dari transaksi jangka pendek.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis menyarankan agar regulator dan bursa berjangka perlu memikirkan dan menciptakan gerakan kelompok pedagang berjangka perseorangan. Niscaya jika kelompok ini berperan menggerakkan perdagangan bursa, maka likuiditas kontrak berjangka multilateral dipastikan signifikan pertumbuhannya. ▲

Transaksi Bursa Berjangka

*) Sumber Bappebti, November 2011

JENSKONTRAK	2011			2010			2011)		
	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	PERUB (%)	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	PERUB (%)	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	PERUB (%)
KONTRAK MULTILATERAL BEU	13.222	0,33	-75,03	15.940	0,28	20,57	87.380	0,37	323,76
KONTRAK MULTILATERAL BKD	3.831	0,09	100,00	216.546	3,35	5.980,35	764.620	10,10	289,23
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BEU + BKD)	17.053	0,33	-67,73	232.486	4,13	1.264,88	852.400	10,27	288,16
KONTRAK LUAR NEGERI (PALN) BEU	24.614	0,55	-60,18	7.305	0,13	-70,32	593	0,01	-21,62
KONTRAK LUAR NEGERI (PALN) BKD	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	733	0,02	100,00
KONTRAK SPA BEU	4.426.120	100,00	-18,68	5.322.768	100,00	21,35	6.915.450	95,91	28,21
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BEU	4.439.342	100,00	-19,40	5.338.713	100,00	21,35	6.916.843	95,92	28,22
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PER	4.426.722		-19,43	5.322.570		28,10	7.792.104		37,90



Coftra & Telecommunication & Information Department will block illegal website

Coftra & Telecommunication & Information Department in a short time will work hand in hand to supervise futures exchange by using information technology.

This action is taken due to increasing number of futures trading offers in online media that doesn't fulfill futures commodity trading regulation and law.

The collaboration is in the form of blocking the website that offers futures trading transaction in online media. This

step is taken to protect people from the risk of investing on illegal futures trading.

"Currently Coftra is establishing the concept and pattern of the collaboration that will be done with Telecommunication & Information Department. Hopefully in a short time this cooperation can be turned into realization to avoid more people becomes victims," Alfons Samosir, Coftra Head of Legal Bureau Explained.

We hope in February 2012 this plan can be realized as the authorized party that will block website or advertisement

that offers futures trading investment in online media is The Telecommunication and Information Department, Alfons added

According to Alfons Samosir, this is the only step that can be done by Coftra to protect people from the risk of online futures trading offer.

"The locations of some of futures trading companies that offer online investment are unknown. Therefore if a risk is occurred on people's side it will be hard to find ad execute it." Alfons Samosir explained. ▲

Bank of Indonesia set gold mortgage transaction

To decrease gold mortgage transaction in Islamic banking, Bank of Indonesia as per 29th of February 2012 published a circular on regulation for gold mortgage. According to Director of Islamic Banking of Bank of Indonesia, Mulya Siregar, this gold mortgage circular is referred to Bank of Indonesia regulation No./17/PBI/2008 in regards to Islamic Bank and Islamic Business Unit Product.

"The circular is including the rule for the amount of loan value (LTV), amount of gold mortgage funding in Islamic Banking and the objective of gold mortgage," Mulya Siregar explained.

According to Mulya, in the past if customer has some money they can get gold because bank paid for it but not in the present. Customer had to have gold first then they can mortgage it. Moreover the objective of gold mortgage is only for short term for example for short term fund addition for micro and small business customer.

In this Bank of Indonesia's rule, the biggest funding amount is 250 million for each customer with 4 months term and can be extended twice. Specifically for UMK customer the biggest funding amount is 50 million with the longest term is 1 year with monthly credit and can't be extended.

"We hope this circular can be reference for Islamic Banking in gold mortgage business," Mulya Siregar explained. ▲



2011 export exceeded the target

Trading minister, Gita Wirjawan, in a press conference on the 1st of Feb 2012 at Trading Minister, expressed that Indonesian export in 2011 has exceeded the target that has been determined for USD 200 billion. The total 2011 export value reached 203,6 billion or increase 29.1% in comparison with 2010 result. This export value was twice bigger than Indonesian export value 5 years ago.

"This export value achievement is very boasting considering that Indonesia is one of few countries that can double up export value in 5 years. Besides Indonesia, Belgium, Russian, Sweden, USA and Brazil are also successfully of doing the same," Gita Wirjawan explained.

Indonesian export value increase was boosted by the increase

of non-oil export for USD 162 billion or 24,8 % and oil export for USD 41,6 billion or 48,3%.

Gita added that Indonesia experienced trading surplus in 2011 for USD 26.3 billion. This surplus is increasing for 19% in comparison with 2010 surplus for USD 22.1 billion.

"The surplus increase was driven by the increase of non-oil & oil trading surplus."

In 2011 almost all 10 non-oil main product export had increase, except for cocoa commodity.

Cocoa export weakening was triggered by decrease of cocoa bean export volume for 51, 9%. However the export of processed cocoa has a significant increase for 78,4 %.

"The increase of processed cocoa export shows the success of government downstream program," Gita Wirjawan added. ▲



Hans Setiadi



PT. First State Futures

Target No. 1

Indonesia Timur

Hans Setiadi, Direktur Utama PT. First State Futures (FSF) sejak semula meyakini industri perdagangan berjangka komoditi merupakan pilihan tepat dalam meniti karier. Namun, dibalik tanggungjawabnya sebagai orang nomor satu di FSF, Hans, demikian dia disapa, masih menyimpan obsesi jangka panjang. Yakni, mengendalikan sebuah bank dengan memilik bisnis perbankan.

“Cita-cita saya sejak remaja menjadi seorang banker yang memiliki usaha perbankan. Tetapi tentunya mewujudkan cita-cita itu perlu perjuangan dan kerja keras,” kata Hans.

Bergabung di FSF sejak tahun 2010, Hans sudah mengemban jabatan sebagai direktur utama. Sedangkan menggeluti bisnis perdagangan berjangka sudah dilakoni sejak duduk dibangku kuliah Univ. Surabaya. Dan, setelah mengantongi ijazah sarjana ekonomi pada tahun 2000, dia pun bergabung di salah satu perusahaan pialang berjangka.

“Berkarya di industri ini penuh tantangan dan oportunitas. Setiap hari kita akan menemukan pengalaman baru dari dinamisnya pasar. Meski kita telah melakukan analisa, namun sering kali pasar masih memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga setiap harinya,” ujar pria

Surabaya kelahiran 14 Februari 1979, ini.

Menurut suami Imelda Betaning (30 tahun) ini, FSF ditahun 2012 ditargetkan masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan pialang berjangka dengan volume transaksi tertinggi. Lalu, setahun kemudian menduduki posisi 5 besar. “Kalau kami sudah bisa menempati posisi 10 besar, itu artinya kami sudah nomor 1 di wilayah timur Indonesia.”

“Kami optimis target itu tercapai, dengan catatan masyarakat kontiniu diedukasi dan disosialisasikan akan manfaat industri perdagangan berjangka komoditi. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih smart dan bijak sebelum berinvestasi,” papar ayah dari Jenson Setiadi (2 tahun) itu.

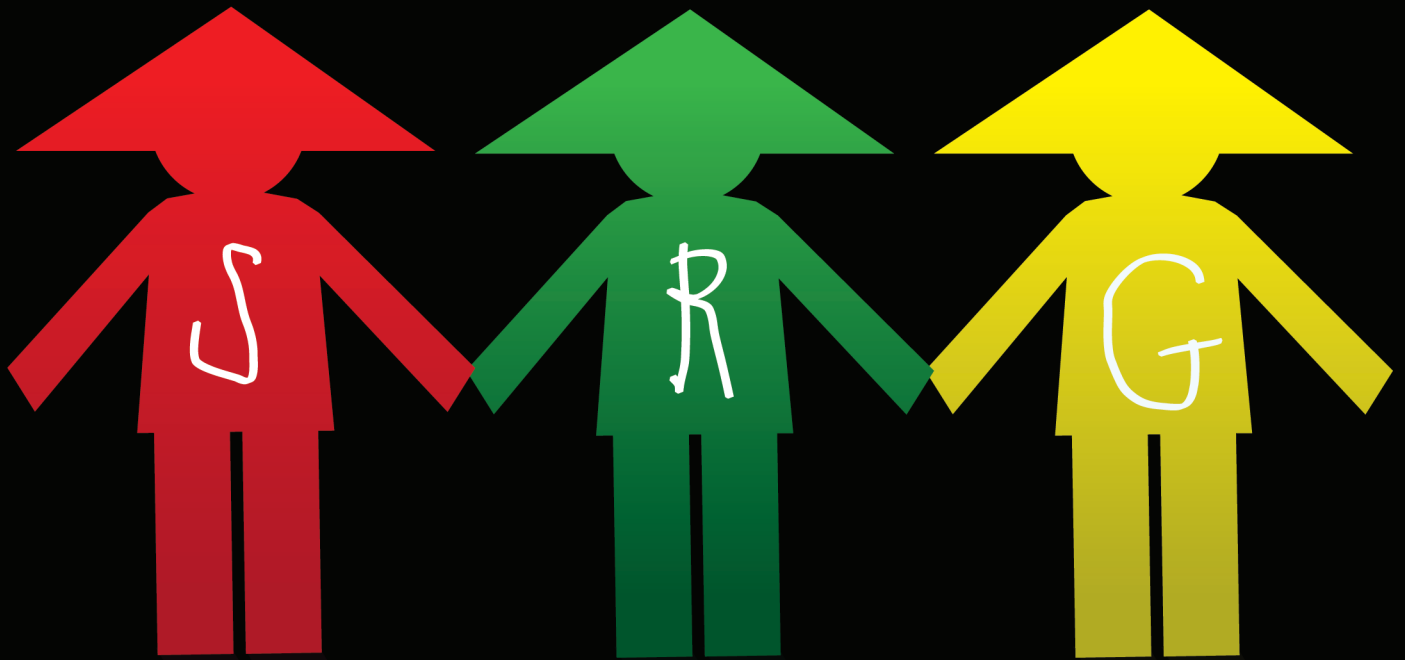
“Meski persaingan di industri ini cukup ketat, tetapi kami yakni di wilayah timur Indonesia potensi pasarnya masih sangat luas. Oleh karena itu FSF berbasis di Surabaya. Dan secara bertahap kami akan menggarap pasar wilayah timur Indonesia,” kata Hans bersemangat.

Langkah awal mengembangkan pasar di wilayah timur Indonesia, FSF sudah mendirikan kantor cabang di Pulau Bali. “Sehingga saat ini kami sudah memiliki tiga kantor cabang yakni di Jember, Solo dan Denpasar. Di Kota Semarang juga pernah kami memiliki kantor cabang, tetapi karena kurang berkembang maka diputuskan untuk ditutup.”

FSF memiliki izin perusahaan pialang berjangka sejak Maret 2010 sudah menjadi anggota dari Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Indonesian Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). “Menjadi anggota dari dua bursa berjangka itu, harapan kami investor memiliki pilihan berinvestasi baik untuk kontrak komoditi primer maupun kontrak komoditi keuangan,” terang Hans.

Salah satu strategi kami menanamkan image industri perdagangan berjangka komoditi untuk masyarakat wilayah Jawa Timur khususnya, di bulan Februari 2012 digelar berbagai event dalam rangka menyambut 2 tahun beroperasinya FSF. Event itu antara lain menghadirkan Miss Indonesia 2011, Astrid Ellena, fashion show, donor darah, dan pameran emas dengan menggandeng PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) selaku pabrikan emas yang berbasis di Jatim. Berbagai kegiatan itu diselenggarakan di South Atrium Galaxy Mall, Surabaya.

“Edukasi dan sosialisasi perdagangan berjangka yang diselenggarakan bagi masyarakat Surabaya itu, kami menggelar talk show yang mengundang Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya dan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintaryo,” kata anak sulung dari dua bersaudara ini. ▲



Sistem Resi Gudang Untuk Petani

- ✓ harga jual lebih baik
- ✓ kepastian kualitas & kuantitas
- ✓ pembiayaan modal kerja